

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan negara memiliki peran yang penting serta strategis dalam pembangunan nasional. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana, terutama dana dari pemerintah dalam negeri. Kebutuhan dana pemerintah yang relatif cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan dipenuhi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pemerintahan negara yang stabil, berasal dari masyarakat sendiri dan dari realokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat yaitu dari sektor perpajakan. Oleh karena itu sektor perpajakan harus dioptimalkan sedemikian rupa sehingga dapat menopang dalam pembangunan nasional di Indonesia

Menurut Sommerfeld, Anderson, dan Brock (dalam Direktorat Penyusunan APBN, 2014) pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, serta dilaksanakan dan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Perkembangan kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara tampak pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Negara
(Dalam Juta Rupiah)

Tahun	Penerimaan Negara	Target Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Terhadap Penerimaan Negara	Persentase Realisasi Terhadap Target
2011	875.490.823	878.685.216	873.721.483	99,80%	99,44%
2012	982.829.932	1.016.237.341	980.470.822	99,76%	96,48%
2013	1.080.211.519	1.148.364.681	1.077.309.220	99,73%	93,81%
2014	1.150.653.575	1.246.106.955	1.146.863.551	99,67%	92,04%
2015	1.250.990.549	1.489.255.488	1.240.372.331	99,15%	83,29%

Sumber : Kementerian Keuangan (Diolah Kembali oleh Peneliti)

Tabel 1.1 memperlihatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun memberikan kontribusi lebih dari 90% penerimaan negara. Ini menunjukkan bahwa peranan pajak sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Terkait dengan perannya yang strategis, penerimaan pajak juga memiliki beberapa risiko. Salah satu risiko yang sering terjadi adalah realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai targetnya atau biasa dikatakan *shortfall*. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun belum mencapai target, bahkan cenderung menurun.

Permasalahan *shortfall* penerimaan pajak merupakan isu tahunan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak perlu dilakukan dengan perencanaan terhadap faktor-faktor yang dinilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Faktor tersebut tersebut dapat berupa faktor pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar

mata uang, harga minyak internasional, produksi mentah minyak internasional dan tingkat suku bunga (Djati dalam Tresno dkk, 2011:4).

Salah satu fenomena yang dialami oleh perekonomian suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatif. Menurut Soesastro (2004), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa sesuatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara mencerminkan seberapa besar tingkat kesejahteraan hidup masyarakat negara tersebut.

Pemerintah dapat merencanakan penerimaan pajak lebih pasti jika terjadi pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi (Herman, 2007). Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan Produk Nasional Bruto (PDB) dari tahun ke tahun.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,2	6,0	5,6	5,0	5,8

Sumber: Kementerian Keuangan 2011 - 2015

Perekonomian nasional selama beberapa periode mengalami pasang surut sebagai dampak dari perubahan lingkungan ekonomi yang berubah secara dinamis. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi menggambarkan seberapa besar output dapat dicapai dalam pembangunan periode tertentu, jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan kenaikan output yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi domestik. Sedangkan, penurunan tingkat kegiatan ekonomi mencerminkan adanya penurunan kegiatan ekonomi nasional pada periode tertentu. (Timbul Hamonangan S dan Imam Mukhlis : 2012).

Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Upaya yang telah dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak antara lain adalah ekstensifikasi dan intensifikasi melalui penambahan Wajib Pajak baru yang memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan keuangan negara dari sektor perpajakan.

Kegiatan ekstensifikasi perpajakan adalah salah satu kebijakan pajak yang dimaksudkan untuk menunjang penerimaan negara yaitu kegiatan yang ditempuh

dalam rangka bentuk perluasan basis pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak (Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:90). Setiap tahunnya jumlah wajib pajak akan bertambah sehingga pertambahan tersebut dapat mengakibatkan jumlah pajak yang disetorkan kepada negara juga semakin bertambah.

Jumlah wajib pajak berbanding lurus dengan penerimaan pph dimana jika penambahan jumlah wajib pajak setiap tahunnya mendorong kenaikan atau peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Penelitian yang dilakukan Rima (2013), menyatakan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak sangat mendukung penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado. Hubungan jumlah pajak dinyatakan sangat kuat, hubungan ini menunjukkan semakin besar jumlah wajib pajak, maka semakin besar jumlah penerimaan PPh.

Selama lima tahun terakhir, upaya Dirjen Pajak tersebut memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan. Data dari tahun 2011 hingga 2015, memperlihatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Jumlah Wajib Pajak	2011	2012	2013	2014	2015
Orang Pribadi	19.881.684	22.131.323	25.109.959	27.687.515	30.202.527
Bendahara	507.882	545.232	563.737	412.827	453.371
Badan	1.929.507	2.136.014	2.328.509	2.474.086	2.683.557
Jumlah	22.321.084	24.814.581	28.004.218	30.576.442	33.341.470

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011 – 2015 (Diolah Kembali oleh Peneliti)

Peningkatan jumlah wajib pajak baik untuk wajib pajak Orang Pribadi, Badan maupun Bendaharawan, masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan besarnya potensi wajib pajak di Indonesia. Berdasarkan data BPS (Laporan BPS, 2016) pada tahun 2014 terdapat 121.872.931 orang yang termasuk dalam angkatan kerja, dan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak orang Pribadi sebanyak 27.687.515 orang atau hanya 23% saja, inilah salah satu yang menyebabkan tingkat penerimaan pajak masih belum optimal.

Sebagaimana yang dinyatakan Rochmat Soemitro, bahwa keberhasilan sistem *self assesment* akan ditentukan oleh kesadaran pajak dari wajib pajak, kejujuran wajib pajak, *tax mindedness*, yaitu hasrat untuk membayar pajak, dan *tax discipline*. Namun peningkatan jumlah wajib pajak tidak diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, padahal peningkatan penerimaan pajak juga ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Ketidakpatuhan dapat dilihat dari adanya gap antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dan jumlah SPT yang disampaikan. Rasio kepatuhan Wajib Pajak dari tahun ke tahun relatif sangat rendah seperti terlihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Wajib Pajak Terdaftar	17.694.317	17.659.278	17.731.736	18.357.833	30.044.103
SPT Tahunan PPh	9.332.626	9.482.480	10.781.103	10.807.624	10.945.567
Rasio Kepatuhan	52,74%	53,70%	60,80%	59,67%	60,27%

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011 – 2015 (Diolah kembali oleh Penulis)

Penelitian yang dilakukan oleh Chairuddin Syah Nasution (2003) menunjukkan bahwa potensi dan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan selama dasawarsa 1990 - 2000 di antaranya dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh faktor-faktor Produk Domestik Bruto, Jumlah Wajib Pajak, dan Jumlah Kantor Pelayanan Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia

Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Penerimaan pajak di Indonesia merupakan tulang punggung perekonomian karena memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara, namun dalam kenyataannya pencapaiannya belum optimal bahkan cenderung menurun. Faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak ini antara lain fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak.

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang penelitian maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak di Indonesia
2. Bagaimana pengaruh jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak di Indonesia

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah pertambahan wajib pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak di Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
2. Pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
3. Pengaruh indikator pertumbuhan ekonomi dan jumlah pertambahan wajib pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

1.4 Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa :

1. Kegunaan praktis dan Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi individu dan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan perpajakan, khususnya kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak baik berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah wajib pajak dan faktor lainnya.

2. Kegunaan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan dan penerapan aplikasi teori ekonomi, perpajakan dan keuangan publik, khususnya mengenai teori yang terkait dengan penerimaan pemerintah khususnya penerimaan pajak.

